

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1) Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan makanan (BPOM) dalam perlindungan konsumen, yaitu: melakukan regulasi, standarisasi dan sertifikasi produk makanan dan obat yang mencakup keseluruhan aspek pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya. Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Peraturan Presiden No 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan bahwa pada produk Obat dan Makanan yang tidak memiliki Izin Edar atau tidak layak dikonsumsi maka BPOM, melakukan penarikan Obat dan Makanan dengan mengeluarkan publik warning mengenai produk Obat dan Makanan, dengan melakukan tindakan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen maupun hasil dari riset BPOM yang mengakibatkan ditariknya suatu produk maupun bahan baku dari produk tersebut. Tindakan represif dari BPOM tidak hanya terbatas pada itu saja, tetapi BPOM juga melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang Obat dan Makanan, Terhadap tindak pidana tersebut BPOM berwenang dalam melakukan penyelidikan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM nomor : HK.00.05.72.4473 tentang Prosedur Tetap Penyidikan Pidana di bidang Obat dan Makanan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap Obat dan Makanan yang beredar di Kota Jayapura dilakukan dua tahap pengawasan, yaitu pengawasan pre-market dan pengawasan post-market. pengawasan pre market adalah pengawasan yang dilakukan sebelum makanan kemasan beredar, hal ini dilakukan dengan cara pendaftaran izin usaha ke BPOM serta pengujian laboratorium bahan-bahan yang akan digunakan untuk makanan kemasan nantinya. Pengawasan post market, yaitu pengawasan yang dilakukan selama makanan

kemasan beredar di Tengah masyarakat. Pengawasan post market ini dilakukan dengan cara pemeriksaan ketoko atau mini market.

Diperlukan peran pengawasan oleh pemerintah dan BPOM melalui pengaturan dan standardisasi; penilaian keamanan, khasiat dan mutu melalui CPOB dan produk obat sebelum diijinkan beredar di Indonesia harus mengantongi izin edar, inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum. Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumen terhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah juga melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

- 2) Dalam melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan kedaluwarsa terdapat beberapa faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh BPOM yaitu kurangnya anggaran, keterbatasan anggaran membuat BPOM tidak bisa melakukan pengawasan keseluruh toko, namun hal ini tidak bisa menjadi alasan BPOM untuk tidak melakukan pengawasan, adapun Upaya yang dilakukan BPOM untuk meminimalisir keterbatasan anggaran adalah dengan cara optimalisasi penggunaan anggaran dan merubah metode pengawasan yaitu dengan cara sampling produk. Kendala yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia juga membuat BPOM tidak bisa melakukan pengawasan ke seluruh toko, karena toko yang ada di Kota Jayapura sangat banyak. Upaya untuk menghadapi kendala ini BPOM melakukannya dengan cara sampling produk dan bekerjasama dengan instansi terkait. Kendala selanjutnya adalah tidak pedulinya Masyarakat Kota Jayapura terhadap sosialisasi BPOM, adapun upaya BPOM untuk meminimalisir kendala tersebut adalah dengan merubah cara sosialisasi, sosialisasi tidak selalu diberikan secara langsung tapi sosialisasi diberikan dan diinformasikan melalui media sosial,

media cetak. Agar distributor maupun masyarakat selaku konsumen lebih mudah untuk mendapatkan informasi.

## B. Saran

- 1) BBPOM harus melakukan pengawasan terhadap produk Obat dan Makanan secara intensif dan rutin untuk menjamin produk yang layak dikonsumsi, dengan melakukan penindakan secara tegas terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan standarisasi produk obat dan makanan yang tidak layak dikonsumsi dan tidak memiliki izin edar yang beredar dimasyarakat luas, dan BBPOM melakukan penyuluhan kepada masyarakat / konsumen supaya jeli membaca informasi dengan baik dan benar untuk mendapatkan produk yang layak dikonsumsi supaya tidak mengonsumsi obat dan makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. BBPOM juga harus menyusun anggaran serta memasukkan biaya-biaya tak terduga atau mengajukan peningkatan anggaran untuk transportasi pengawasan, dan mengkai kebutuhan anggaran saat ini dan sebelumnya untuk diajukan untuk penggunaan anggaran tahun selanjutnya. Kepada para pelaku usaha atau produsen agar lebih bertanggung jawab lagi kepada konsumen, jika konsumen menerima makanan kedaluwarsa. Kepada pihak BBPOM lebih meningkatkan lagi jumlah sumber daya manusianya dan BBPOM Kota Jayapura harus lebih meningkatkan lagi estimasi monitoring ke lapangan secara berkala di tiap bulannya, agar pengawasan peredaran obat dan makanan kedaluwarsa semakin ketat.
- 2) Lebih banyak melakukan sosialisasi melalui media sosial tidak hanya dari website BBPOM saja, melainkan memberikan sosialisasi melalui Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, selain dapat menghemat anggaran masyarakat juga dapat lebih

mudah mengetahui informasi- informasi mana produk yang boleh dikonsumsi dan mana produk yang menggunakan bahan berbahaya melalui media sosial. Selain itu juga dapat membantu mempermudah pengawasan BBPOM.